

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Kondisi ini akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Munir (2002), menyatakan bahwa kunci keberhasilan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang struktur setiap daerah dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah ditekankan baik di bidang pembangunan produksi maupun

infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2011).

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi.

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam

menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sehingga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan (Sjafrizal,1997).

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah dengan cara mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Proses perkembangan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana dapat terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian, namun secara umum menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah dan pertumbuhan daerah, sebab daerah masih merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang menyebabkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah sebagai proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian negara maupun struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Sektor pertanian selama ini masih memegang peranan penting baik di tingkat nasional maupun regional, namun peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan suatu proses transformasi struktural (Ikhsan dan Armand: 1993).

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional antara lain adalah menyediakan kebutuhan bahan pangan, menyediakan bahan baku industri, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga

kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, sumber perolehan devisa (Kuznets 1964, dikutip dari tulisan Harianto : 2007).

Agroindustri sebagai subsistem pertanian mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi karena memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Disamping itu, pengembangan agroindustri dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. (Habibie, Nono dan Wardani,1995, dikutip dari tulisan Mukhyi).

Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999)

Berikut ini tabel perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tabel 1. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2009-2011 Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta)

KABUPATEN/KOTA	2009	2010	2011
1 Lampung Barat	1.427.754,33	1.509.674,17	1.578.013,73
2 Tanggamus	2.224.935,09	2.353.653,51	2.504.609,21
3 Lampung Selatan	4.114.890,53	4.348.906,32	4.612.550,00
4 Lampung Tengah	4.119.786,25	4.330.053,42	4.591.196,00
5 Lampung Tengah	5.883.047,29	6.228.793,46	6.587.164,98
6 Lampung Utara	3.208.506,44	3.368.212,58	3.577.987,52
7 Way Kanan	1.340.230,07	1.409.575,87	1.487.010,59
8 Tulang Bawang	2.129.602,46	2.261.365,40	2.385.678,75
9 Pesawaran	1.572.793,74	1.661.428,14	1.775.910,00
10 Pringsewu	1.262.944,58	1.350.744,17	1.446.601,92
11 Tulang Bawang Barat	1.064.633,11	1.127.310,40	1.199.022,21
12 Mesuji	1.180.841,47	1.250.840,75	1.327.384,72
13 Bandar Lampung	6.151.068,58	6.540.520,84	6.967.850,70
14 Metro	531.201,80	562.509,42	598.518,93
Propinsi Lampung	36.256.294,87	38.389.899,22	43.505.816,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB terbesar adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai PDRB 6.967.850,70 juta yang diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai PDRB 6.587.164,98 juta. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung dengan luas wilayah 4.789,82 km² mengalami pertumbuhan ekonomi cukup maju.

Tabel 2. PDRB Sektoral Kabupaten Lampung Tengah 2009-2011 Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011
1. Pertanian	2.838.854,35	2.972.951,76	309.963,97
2. Pertambangan & Penggalian	78.702,67	82.782,61	89.784,71
3. Industri Pengolahan	858.495,37	899.714,20	94.221,67
4. Listrik, Gas & Air Bersih	24.776,16	25.390,65	28.423,10
5. Konstruksi	345.309,18	36.271,18	388.190,32
6. Perdag., Hotel & Restoran	869.267,66	929.442,32	992.654,59
7. Pengangkutan & Komunikasi	158.507,81	189.129,11	218.229,75
8. Keu. Real Estat, & Jasa Perusahaan	331.644,09	378.018,14	423.211,52
9. Jasa-Jasa	377.490,02	389.293,49	405.585,36
PDRB	5.883.047,29	6.228.793,46	6.587.164,98

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2. diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2009 nilai PDRB sektor pertanian mencapai 2.838.854,35 juta yang meningkat menjadi 309.963,97 juta pada tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai

“Analisis Perubahan Economic base Kabupaten Lampung Tengah 2000-2011”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Sektor non ekstraktif apa saja yang mengalami perubahan struktur?
2. Sektor ekstraktif apa saja yang mengalami perubahan struktur?
3. Sektor apa saja yang mengalami pertumbuhan yang cepat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

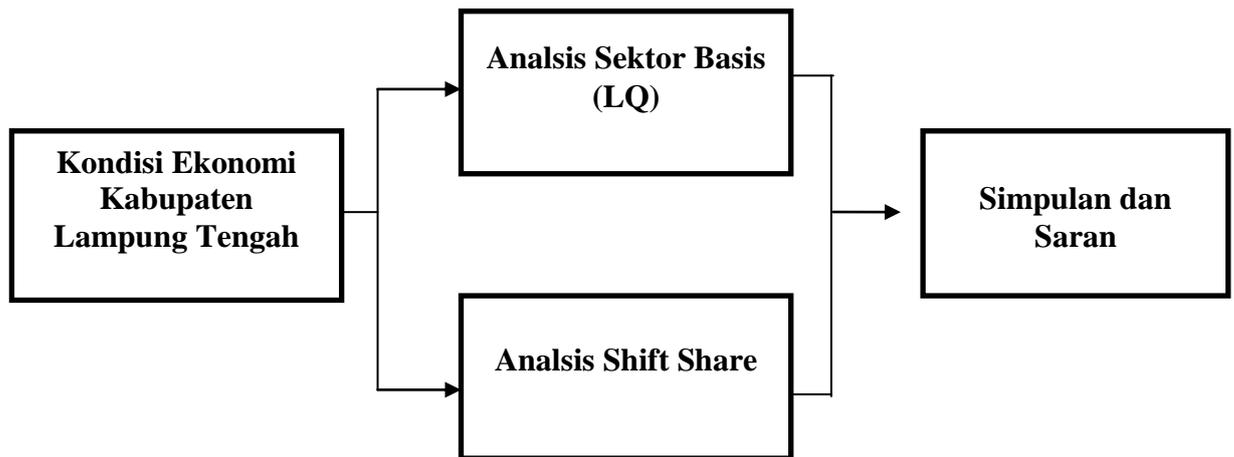
1. Mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi pada sektor ekstraktif dan nonekstraktif di kabupaten Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi penelitian-penelitian yang akan mengkaji lebih dalam mengenai Kabupaten Lampung Tengah

E. Kerangka Pemikiran

Secara skematis, kerangka pemikiran dalam tulisan ini digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini, pada tahap awal akan melakukan pengamatan terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis LQ untuk menentukan perubahan sektor yang menjadi basis perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. setelah diketahui perubahan struktur perekonomiannya, maka akan dipadukan antara hasil analisis LQ dan Shift Share untuk mengetahui apakah dalam perubahan struktur perekonomiannya, Kabupaten Lampung Tengah, sektor yang mengalami perubahan tumbuh dengan cepat atau tidak.